



SIARAN PERS
HASIL SIDANG TAHUNAN KE-15
ASIA-PACIFIC PARLIAMENTARY FORUM (APPF),
MOSKOW, FEDERASI RUSIA, 21 – 25 JANUARI 2007

Pembangunan strategi pengentasan kemiskinan dan penjaminan hak untuk hidup bagi masyarakat mensyaratkan suatu upaya pengambilan langkah-langkah kebijakan dan partisipasi aktif setiap negara. Baik negara maju maupun negara berkembang diharapkan dapat mendorong strategi pengentasan kemiskinan tersebut melalui pembangunan ekonomi seperti pemberian fasilitas kredit kepada pengusaha kecil dan menengah, *debt relief* dan peningkatan kualitas pendidikan serta penguatan *capacity-building*. Selain itu, perlu ditegaskan kembali komitmen dan implementasi negara-negara maju untuk mengalokasikan 0.7% dari GNP mereka bagi bantuan pembangunan untuk negara-negara berkembang.

Hal ini disampaikan oleh delegasi DPR-RI dalam mencermati masalah pengentasan kemiskinan yang merupakan salah satu tema pembahasan di dalam Sidang Tahunan *Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF)* ke-15 yang berlangsung di Moskow, Federasi Rusia pada tanggal 21 hingga 25 Januari 2007. Dalam sidang APPF ke-15 ini, delegasi DPR-RI dipimpin oleh Ketua DPR-RI, H.R. Agung Laksono dan didampingi oleh 7 anggota delegasi lainnya. Delegasi DPR-RI sangat mewarnai jalannya sidang, hal ini terlihat dari 20 resolusi yang dihasilkan dalam sidang ini dimana 7 diantaranya diajukan oleh delegasi DPR-RI dan 3 diantaranya disponsori oleh delegasi DPR-RI bersama beberapa negara lainnya. Resolusi-resolusi yang dimaksud diantaranya mengenai *Cooperation in Disaster Management and Emergency Response, Dialogue of Civilizations and Interfaith Dialogue, Energy Security, Securing Peace and Stability in the Asia-Pacific Region: The Way towards a Multi-Polar World, Joint Efforts in Combating Pandemic Diseases, Poverty Alleviation* dan lain-lain.

Dalam pembahasan mengenai dialog antar peradaban dan dialog antar agama, delegasi DPR-RI menyerukan kepada parlemen, pemerintah dan masyarakat di kawasan Asia Pasifik untuk secara aktif berpartisipasi dalam dialog antar peradaban dan dialog antar agama dalam rangka memperkuat saling pengertian dan saling menghormati setiap penganut agama atau kepercayaan di kawasan Asia Pasifik khususnya dan dunia pada

umumnya. Delegasi DPR-RI merekomendasikan kepada APPF sebagai forum parlemen di kawasan Asia Pasifik untuk mengembangkan jaringan antar parlemen dalam upaya menciptakan dan memajukan dialog antar peradaban dan agama.

Selanjutnya dalam pembahasan mengenai manajemen penanggulangan bencana alam, delegasi DPR-RI menegaskan bahwa setiap negara mempunyai tanggung jawab besar untuk melindungi masyarakat beserta hak miliknya dari bencana alam. Namun demikian, delegasi DPR-RI memandang pentingnya untuk mendorong kerjasama regional dan internasional dalam upaya menjamin kesiap-siagaan menghadapi bencana maupun membantu negara-negara korban bencana dalam menanggulangi dampak bencana dalam berbagai tingkatan sehingga dapat mengurangi jumlah korban, kerugian ekonomi serta kerusakan asset lingkungan global. Oleh karena itu, delegasi DPR-RI juga menekankan pentingnya pengembangan dan penguatan institusi, mekanisme, dan kapasitas baik di tingkat regional maupun internasional dalam rangka mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh bencana alam.

Jakarta, 26 Januari 2007